

Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Terhadap Kinerja Finansial, Kinerja Non Finansial Dan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus Pada: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

**Taufik Julia
Antar MT Sianturi**

ABSTRACT

This Purpose of this study is to determine the effect of the application of financial management Public Service Agency (PK-BLU) to the performance of financial, non-financial performance and quality of education services. The independent variable in this study is the Financial Administration of the Public Service (PK-BLU), while the dependent variable is financial performance, non-financial performance and quality of education services. This research was conducted at the University of Sultan Ageng Tirtayasa by taking the 41 respondents to fill out the questionnaire. By using secondary data year period 2010-2014. The results showed that the application of the financial management of public service agencies (PK-BLU) has a positive effect to financial performance, non-financial performance and quality of education services.

Keywords *Financial management of public service agencies (PK-BLU), Financial Performance, non-financial performace, Quality of education Service*

PENDAHULUAN

Penulis seringkali mendengar isu tentang penilaian kinerja organisasi pemerintah yang seringkali mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat, hal ini dikarenakan ada anggapan di masyarakat bahwa banyak satuan-satuan kerja yang ada di pemerintah lebih mengutamakan daya serap anggaran dibandingkan dengan kinerja dilapangan. Dalam (Waluyo, 2011), paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara meliputi 1) UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2) UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan dan meningkatkan produktivitas. Masalah klasik dalam bidang pelayanan umum adalah kualitas dan harga, bila dibandingkan dengan sektor privat, sektor publik masih sering tertinggal mengenai kualitas pelayanan, hal ini sering dikaitkan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar oleh para pengguna. Tabel dibawah ini dapat menggambarkan perbandingan kualitas serta harga layanan sektor privat dan publik.

Perbandingan Kualitas serta Harga Layanan Sektor Privat dan Publik

No	Item	Privat	Publik	Ideal
1	Kualitas	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Harga	Tinggi	Rendah	<i>Sharing</i>
3	Lembaga	Swasta	Pemerintah	Pemerintah
4	Pengelolaan	Korporasi	<i>Governmental</i>	Korporasi

Sumber : Waluyo (2011)

Pada tabel diatas terlihat bahwa adanya perbedaan perbandingan antara sektor privat dan publik. Pada sektor privat yang pengelolaannya berupa korporasi dan swasta sebagai lembaganya dapat menyediakan jasa pelayanan yang memiliki kualitas tinggi tentu dengan harga yang tinggi pula. Beda halnya dengan sektor publik yang memberikan kualitas jasa pelayanan yang rendah karena identik dengan harga yang rendah pula. Padahal secara ideal konsumen mengharapkan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan sistem pengelolaan korporasi yang profesional akan tetapi pemerintah sebagai lembaga pengelolanya.

Badan Layanan Umum (BLU) pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya menurut Prihatsanti (2010), perubahan status BLU memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana. Selain itu juga, PNBP tidak perlu disetor ke kas negara tetapi bisa dikelola secara mandiri, namun tetap mendapat subsidi pemerintah dari dana APBN.

Pengawasan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga audit internal yang dibentuk universitas, akuntan publik yang pelaporannya tidak sekedar pada pemerintah tapi juga kepada publik (masyarakat). Sistem PK-BLU memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis yang digunakan untuk menambah dana pendukung operasional institusi sejalan dengan jasa layanan yang dimiliki. Sistem kepegawaian terbagi menjadi pegawai PNS dan non PNS dengan pemberian remunerasi berbasis kinerja. PK-BLU didasarkan pada produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja.

Adapun motivasi penulis melakukan penelitian ini adalah guna melihat bagaimana pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) dengan melihat kinerja Untirta secara finansial, non finansial dan mutu layanan pendidikan.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk melihat bagaimana pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) terhadap kinerja finansial Untirta
2. Untuk melihat bagaimana pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) terhadap kinerja non finansial Untirta
3. Untuk melihat bagaimana pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) terhadap mutu layanan pendidikan Untirta

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. *Agency Theory* (Teori Agensi)

Menurut Paton dalam Suwardjono (2005), menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri atau kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Atau dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (*reporting entity*) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja baik secara finansial maupun non finansial merupakan bagian dari pertanggungjawaban.

2. *Signaling Theory* (Teori Sinyal)

Jama'an (2008), menjelaskan bahwa teori sinyal adalah bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal (tanda) kepada pengguna laporan keuangan dan kinerja sebuah entitas. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan atau entitas tersebut lebih baik dari entitas lain.

Konsep Kinerja

Dalam Iswari (2011), pengertian penilaian kinerja merupakan pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kinerja nyata dengan hasil-hasil yang diharapkan akan tercapai. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), sistem penilaian kinerja adalah suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan untuk perusahaan agar strategi yang dijalankan dapat berhasil. Penilaian kinerja menurut dalam Iswari (2011) yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Iswari (2011) menyimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rentan nilai yang ada dalam perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dilakukan sebagai umpan balik yang akan memberikan prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dalam perusahaan yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi dan dalam mematuhi perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya (yang berupa kebijakan atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran) agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Penilaian Kinerja untuk Organisasi Sektor Publik

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program. Kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Bastian, 2011). Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Bastian (2011), juga

menyatakan pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperhensif. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain :

- a) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- b) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik di belanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Mardiasmo (2011), menjelaskan sistem pengukuran sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Tujuan sistem penilaian kinerja adalah :

- a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b) Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang
- c) Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*
- d) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain :

- a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan tingkat kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Penilaian Kinerja Pendidikan Secara Finansial

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER36/PB/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa penilaian kinerja keuangan satker BLU adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan satker BLU kepada masyarakat khususnya untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan BLU, ayat (3) menerangkan bahwa laporan

keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban satker BLU berupa laporan operasional/aktivitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, selanjutnya dalam ayat (4) mengatakan bahwa aspek keuangan adalah rasio-rasio keuangan yang membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran tentang keuangan satker BLU dan penilaian posisinya pada suatu periode yaitu meliputi rasio keuangan dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional, ayat (5) menyebutkan bahwa rasio keuangan adalah alat analisis keuangan untuk menilai kinerja keuangan satker BLU berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan dalam ayat (6) mengatakan bahwa rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional adalah perbandingan antara pendapatan PNBPN satker BLU dengan biaya operasional.

Selanjutnya dalam PER 36/PB/2012 menjelaskan bahwa pedoman penilaian kinerja keuangan satker BLU meliputi:

a. Aspek Keuangan

Penghitungan kinerja keuangan satker BLU dari aspek keuangan menggunakan rasio keuangan dan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional. Rasio keuangan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Rasio kas (*cash ratio*)
- 2) Rasio lancar (*current ratio*)
- 3) Periode penagihan piutang (*collection period*)
- 4) Perputaran aset tetap (*fixed asset turnover*)
- 5) Imbalan atas aktiva tetap (*return on asset*)
- 6) Imbalan ekuitas (*return on equity*)

b. Aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU

Aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU terdiri dari:

- 1) Rencana bisnis dan anggaran (RBA) definitif
- 2) Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK)
- 3) Surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B)
- 4) Tarif layanan
- 5) Sistem akuntansi
- 6) Persetujuan rekening
- 7) SOP pengelolaan kas
- 8) SOP pengelolaan piutang
- 9) SOP pengelolaan utang
- 10) SOP pengadaan barang dan jasa
- 11) SOP pengelolaan barang inventaris

Penilaian Kinerja Pendidikan secara Non Finansial

Penilaian kinerja secara non finansial dapat melihat dari dua aspek yakni standar pelayanan pemangku kepentingan dan standar pelayanan untuk perspektif pendidikan dan pengembangan. Dalam Permendiknas RI No. 39 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Untirta yang menyebutkan empat standar yakni:

- a) Standar Pelayanan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)
- b) Standar Pelayanan Untuk Perspektif Proses Pendidikan dan Pengembangan (*Teaching and Learning Process*)

- c) Standar Pelayanan Manajemen dan Keuangan (*Administration and Finance*)
- d) Standar Pelayanan dan Etos Budaya Kerja

Dari keempat standar diatas untuk penilaian kinerja non finansial, penulis memfokuskan pada standar pelayanan pemangku kepentingan dan standar pelayanan untuk perspektif proses pendidikan dan pengembangan, sedangkan standar pelayanan manajemen dan keuangan dan standar pelayanan dan etos budaya kerja penulis jadikan sebagai standar penilaian mutu pelayanan pendidikan pada Untirta.

Badan Layanan Umum (BLU)

Konsep dan Definisi Badan Layanan Umum (BLU)

Menurut Lukman (2013), mengatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum diungkapkan bahwa definisi Badan Layanan Umum adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam hal tata kelola keuangan, selanjutnya peraturan pemerintah tersebut menjabarkan secara lebih jauh tentang pola pengelolaan keuangan badan layanan (PK-BLU) yang diartikan sebagai pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Dengan melihat kedua definisi diatas, terdapat lima karakteristik khusus yang sedikit membedakan Badan Layanan Umum dengan organisasi ataupun instansi pemerintah lainnya, yakni:

- 1) BLU adalah instansi pemerintah yang memberikan layanan penyediaan barang dan jasa. Ini adalah karakter utama dari Badan Layanan Umum.
- 2) BLU harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan pencarian keuntungan.
- 3) BLU dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas
- 4) Adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU.
- 5) BLU dikecualikan dari ketentuan keuangan negara pada umumnya.

Alasan Menggunakan Konsep BLU

Dalam Waluyo (2011), mengatakan bahwa dilingkungan birokrasi pemerintahan, terdapat banyak satuan kerja yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU. Ada yang mendapatkan imbalan dari masyarakat dalam proporsi yang signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana APBN/APBD. Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah yang dijelaskan pada bab sebelumnya dimana peneliti ingin melihat pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan BLU yang memiliki tujuan untuk meningkatkan layanan kepada publik dengan berbagai kemudahan pengelolaan keuangan yang berbeda dari satker APBN biasa, maka pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) terhadap kinerja finansial, kinerja non finansial dan mutu layanan pendidikan di Untirta dapat dianalisa dengan melihat aspek finansial melalui aspek keuangan dan aspek kepatuhan berdasarkan PER-36/PB/2012 tanggal 25 Oktober 2012, sedangkan kinerja non finansial melalui standar pelayanan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan standar pelayanan perspektif pendidikan dan pengembangan dan mutu pelayanan pendidikan dengan melihat standar pelayanan manajemen keuangan dan standar pelayanan etos dan budaya kerja sesuai dengan standar pelayanan minimum Untirta berdasarkan Permendiknas No. 39 tahun 2011.

Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011), “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah-masalah, karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang dijelaskan, maka penulis menemukan hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) terhadap Kinerja Finansial Untirta

Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) merupakan bentuk pola pengelolaan keuangan yang berbeda dari satker biasa pemerintah. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan produktif. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan dalam sektor publik dimaksudkan untuk menilai akuntabilitas keuangan dari satuan kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan PK-BLU guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan produktif.

Maka peneliti mengajukan hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H₁ : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berpengaruh positif terhadap Kinerja Finansial Untirta

Pengaruh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) terhadap Kinerja Non Finansial Untirta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam hal tata kelola keuangan, selanjutnya peraturan pemerintah tersebut menjabarkan secara lebih jauh tentang pola pengelolaan keuangan badan layanan (PK-BLU) yang diartikan sebagai pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Kinerja non finansial juga tentunya akan mengalami peningkatan seiring dengan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU).

H₂ : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berpengaruh positif terhadap Kinerja Non Finansial Untirta.

Pengaruh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) terhadap Mutu Layanan Akademik

Pelayanan akademik merupakan produk utama dari perguruan tinggi sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dinyatakan bahwa: “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan, “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Dalam UU tersebut jelas bahwa pelayanan kepada publik menjadi bagian mutlak dari tata kelola badan layanan umum. Sehingga UU menginginkan ada peningkatan layanan kepada publik.

Maka peneliti mengajukan hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H₃ : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berpengaruh positif terhadap Mutu Layanan Pendidikan Untirta.

Untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian dan uji statistik.

Metode Penelitian Rancangan Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat. Adapun pengertian desain penelitian yang telah dikemukakan oleh Uma Sekaran (2011) menyatakan bahwa :

“Desain Penelitian adalah suatu rencana penelaahan atau penelitian secara ilmiah dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah”.

Menurut Sugiyono (2011), menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber Masalah

2. Rumusan Masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan.
4. Metode Penelitian.
5. Menyusun Instrument Penelitian.
6. Kesimpulan

Unit analisis pada penelitian ini adalah Untirta dengan periode pelaporan 2010-2014. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) terhadap penilaian kinerja finansial, non finansial serta peningkatan mutu layanan pendidikan di Untirta.

Definisi Operasional

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini berusaha untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) dalam penilaian kinerja secara finansial maupun non finansial serta meningkatkan mutu layanan akademik Untirta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel bebas yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU). Meidyawati (2011), menjelaskan bahwa pengaruh penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum terhadap tiga aspek yakni finansial, non finansial dan mutu layanan pendidikan yang diberikan.

Variabel Dependen

variabel dependen adalah variabel tidak bebas (terikat) yang nilainya sangat dipengaruhi oleh variabel independennya. Dalam penelitian ini ada tiga variabel dependen yakni: penilaian kinerja finansial, non finansial dan mutu akademik.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan pada satu atau lebih bagian yang merupakan fundamental. Pada penelitian ini peneliti memilih Untirta sebagai universitas negeri di provinsi Banten sebagai populasi. Pengambilan sampel digunakan dengan cara *purposive sampling* sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel yang terdiri dari staf administrasi, dosen dan mahasiswa.

Analisis Hasil Penelitian

Deskripsi Data Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang pengaruh pola PK-BLU terhadap penilaian kinerja finansial, kinerja non finansial dan penilaian mutu layanan akademik. Dalam penelitian ini penulis telah mengolah kuesioner tersebut dan mendeskripsikan data tersebut yang terbagi atas pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) sebagai variabel X, penilaian kinerja finansial/keuangan sebagai Y_1 , penilaian kinerja non-finansial sebagai Y_2 dan penilaian mutu akademik sebagai Y_3 pada Untirta yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1) PK-BLU (X), terdapat jumlah responden sebanyak 41 orang yang mengisi kuesioner. Diperoleh hasil untuk: rata-rata (*mean*) sebesar 59,10, titik tengah (*median*) 60,00, nilai yang sering muncul (*mode*) adalah 60, simpangan baku (*standard deviation*) adalah 10,212, tingkat penyebaran data (*variance*) sebesar 104,290, rentangan (*range*) adalah 53, skor minimum data adalah 19, dan skor maksimum sebesar 72, sedangkan jumlah skor keseluruhan data sebesar 2423.

2) Penilaian kinerja finansial (Y_1), terdapat jumlah responden sebanyak 41 orang yang mengisi kuesioner. Diperoleh hasil untuk: rata-rata (*mean*) sebesar 51,32, titik tengah (*median*) 52,00, nilai yang sering muncul (*mode*) adalah 52, simpangan baku (*standard deviation*) adalah 7,789, tingkat penyebaran data (*variance*) sebesar 60,672, rentangan (*range*) adalah 44, skor minimum data adalah 18, dan skor maksimum sebesar 62, sedangkan jumlah skor keseluruhan data sebesar 2104.

3) Penilaian kinerja non finansial (Y_2), terdapat jumlah responden sebanyak 41 orang yang mengisi kuesioner. Diperoleh hasil untuk: rata-rata (*mean*) sebesar 40,88, titik tengah (*median*) 44,00, nilai yang sering muncul (*mode*) adalah 44, simpangan baku (*standard deviation*) adalah 8,268, tingkat penyebaran data (*variance*) sebesar 68,360, rentangan (*range*) adalah 42, skor minimum data adalah 13, dan skor maksimum sebesar 55, sedangkan jumlah skor keseluruhan data sebesar 1676.

4) Penilaian mutu akademik (Y_3), terdapat jumlah responden sebanyak 41 orang yang mengisi kuesioner. Diperoleh hasil untuk: rata-rata (*mean*) sebesar 70,90, titik tengah (*median*) 72,00, nilai yang sering muncul (*mode*) adalah 72, simpangan baku (*standard deviation*) adalah 10,295, tingkat penyebaran data (*variance*) sebesar 105,990, rentangan (*range*) adalah 59, skor minimum data adalah 27, dan skor maksimum sebesar 86, sedangkan jumlah skor keseluruhan data sebesar 2907.

Hasil Pengolahan Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat kevalidan instrumen penelitian, artinya instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Keputusan pada sebuah butir pertanyaan dapat dianggap valid dan dapat menggunakan koefisien korelasi *range spearman* yang hasilnya melebihi 0,3. Nilai koefisien *range spearman* tersebut dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan program SPSS 20.00.

Berdasarkan tabel hasil uji validitas variabel x (PK-BLU) dari 15 item pertanyaan kuesioner tentang variabel x (PK-BLU) nilai koefisien korelasi semua

melebihi 0,300 dan semua pertanyaan dinyatakan valid dan dapat diukur, dengan nilai tertinggi pada pertanyaan ketiga dengan nilai koefisien 0,917 dan nilai terendah berada pada pertanyaan kedelapan senilai 0,617.

Berdasarkan tabel hasil uji validitas variabel Y_1 (Penilaian Kinerja Finansial) dari 13 item pertanyaan kuesioner tentang variabel Y_1 (Penilaian Kinerja Finansial) nilai koefisien korelasi semua melebihi 0,300 dan semua pertanyaan dinyatakan valid dan dapat diukur, dengan nilai tertinggi pada pertanyaan keenam dengan nilai koefisien 0,815 dan nilai terendah berada pada pertanyaan ketiga senilai 0,528.

Berdasarkan tabel hasil uji validitas variabel Y_2 (Penilaian Kinerja Non Finansial) dari 11 item pertanyaan kuesioner tentang variabel Y_2 (Penilaian Kinerja Non Finansial) nilai koefisien korelasi semua melebihi 0,300 dan semua pertanyaan dinyatakan valid dan dapat diukur, dengan nilai tertinggi pada pertanyaan keenam dengan nilai koefisien 0,869 dan nilai terendah berada pada pertanyaan kedelapan senilai 0,649.

Berdasarkan tabel hasil uji validitas variabel Y_3 (Penilaian Mutu Layanan Pendidikan/akademik) dari 18 item pertanyaan kuesioner tentang variabel Y_3 (Penilaian Mutu Layanan Pendidikan/akademik) nilai koefisien korelasi semua melebihi 0,300 dan semua pertanyaan dinyatakan valid dan dapat diukur.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya atau menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi dalam hasil pengukuran. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Alpha pada output pengolahan data dengan program SPSS 20.00 dengan nilai *r tabel*. Berikut ini hasil pengujian Reliabilitas untuk ketiga variabel penelitian yaitu PK_BLU, penilaian kinerja finansial, penilaian kinerja finansial, penilaian kinerja non finansial dan penilaian mutu layanan akademik.

Tabel 4.19
Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Nilai Alpha	Nilai r tabel	Kesimpulan
PK-BLU	0,967	0,316	Reliabel
Penilaian Kinerja Finansial	0,926	0,316	Reliabel
Penilaian Kinerja non Finansial	0,944	0,316	Reliabel
Penilaian Mutu Layanan Akademik	0,950	0,316	Reliabel

Sumber: SPSS 20 data diolah 2014

Berdasarkan hasil pengujian pada tingkat signifikan 5% didapat nilai *r-tabel* untuk $df = 41$ adalah sebesar 0,316. Dengan demikian, dapat diketahui pada tabel 4.19 (uji reliabilitas) disimpulkan bahwa seluruh penelitian memiliki reliabilitas, karena nilai alphanya lebih besar dari nilai *r tabelnya*, sehingga dapat dipakai sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilakukan dengan cara melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas yaitu jika signifikansi $< 0,05$,

maka H_0 diterima (terdapat pengaruh) dan sebaliknya jika signifikansi $>0,05$, maka H_0 tidak diterima (tidak terdapat pengaruh). Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS seperti yang terlihat sebagai berikut:

Uji t Pengaruh PK-BLU terhadap Kinerja Finansial Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,450	3,089		3,383	,002
PK_BLU	,692	,052	,907	13,419	,000

a. Dependent Variable: KIN_FIN

Sumber: Hasil olah data SPSS (2014)

Berdasarkan tabel hasil SPSS diatas maka didapat persamaan regresi linier dari uji pengaruh Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dengan penilaian kinerja finansial Untirta didapatkan persamaan:

$$Kin_Fin = 10,450 + 0,692 PK_BLU$$

Persamaan regresi linear ini mempunyai arti bahwa PK-BLU dapat mempengaruhi kinerja finansial dengan setiap perubahan satu satuan maka akan berubah sebesar 0,692. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat disimpulkan dengan melihat pengaruh variabel independen terhadap masing-masing variabel dependen. Dari hasil pengolahan data SPSS menunjukkan nilai signifikansi variabel kinerja finansial sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,692 sehingga dapat disimpulkan bahwa PK-BLU berpengaruh positif terhadap kinerja finansial Untirta, dengan keputusan H_1 diterima.

**Tabel
Uji t Pengaruh PK-BLU terhadap Kinerja Non Finansial Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,482	4,165		,116	,908
PK_BLU	,684	,069	,844	9,839	,000

a. Dependent Variable: KIN_NF

Sumber: Hasil olah data SPSS (2014)

Berdasarkan tabel hasil SPSS diatas maka didapat persamaan regresi linier dari uji pengaruh Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dengan penilaian kinerja non finansial Untirta didapatkan persamaan:

$$KIN_NF = 0,482 + 0,684 PK_BLU$$

Persamaan regresi linear ini mempunyai arti bahwa PK-BLU dapat mempengaruhi kinerja non finansial dengan setiap perubahan satu satuan maka akan berubah sebesar 0,684. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat disimpulkan dengan melihat pengaruh variabel independen terhadap masing-masing variabel dependen. Dari hasil pengolahan data SPSS menunjukkan nilai signifikansi variabel kinerja non finansial sebesar $0.000 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,684 sehingga dapat disimpulkan bahwa PK-BLU memiliki pengaruh positif terhadap kinerja non finansial Untirta, dengan keputusan H_2 diterima.

Tabel
Uji t Pengaruh PK-BLU terhadap Pelayanan Mutu Akademik

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18,041	4,464		4,042	,000
PK_BLU	,894	,074	,887	12,013	,000

a. Dependent Variable: MUTU_AKAD

Uji pengaruh Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dengan penilaian mutu akademik Untirta didapatkan persamaan:

$$MUTU_AKAD = 18,041 + 0,894PK_BLU$$

Persamaan regresi linear ini mempunyai arti bahwa PK-BLU dapat mempengaruhi kinerja mutu layanan akademik dengan setiap perubahan satu satuan maka akan berubah sebesar 0,894. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat disimpulkan dengan melihat pengaruh variabel independen terhadap masing-masing variabel dependen. Dari hasil pengolahan data SPSS menunjukkan

nilai signifikansi variabel mutu layanan akademik sebesar $0.000 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,894 sehingga dapat disimpulkan bahwa PK-BLU memiliki pengaruh positif terhadap mutu layanan akademik, dengan demikian H_3 diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pengaruh variabel independen yakni Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) terhadap penilaian kinerja finansial, kinerja non finansial dan mutu layanan pendidikan. Hasil pengujian akan dibahas satu persatu yakni sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja finansial Untirta. Artinya penerapan PK-BLU dapat meningkatkan kinerja finansial Untirta, hal ini bisa terjadi karena dalam penilaian kinerja finansial berfokus pada aspek keuangan dan aspek kepatuhan.

Pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) mempunyai tujuan agar kinerja keuangan seharusnya mengalami peningkatan dan pengelolaan keuangannya lebih efektif dan efisien. Serta proses pelaporan dan pengelolaan lebih akuntabel dan transparan. Sehingga hasil penelitian sejalan dengan teori dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja non finansial Untirta. Hal ini menunjukkan dengan penerapan PK-BLU dapat meningkatkan kinerja non finansial Untirta yang ditinjau dari standar pelayanan pemangku kepentingan dan standar pelayanan untuk perspektif proses pendidikan dan pengembangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) memiliki pengaruh positif terhadap mutu layanan akademik Untirta. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan PK-BLU dapat meningkatkan mutu layanan akademik Untirta yang dilihat dari aspek standar pelayanan manajemen dan keuangan serta standar pelayanan dan etos budaya kerja.

Simpulan dan implikasi manajerial

Simpulan

Dari pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan uji regresi linier sederhana, berdasarkan hasil hipotesis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja finansial Untirta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PK-BLU dapat meningkatkan kinerja finansial Untirta. Sehingga hasil penelitian sejalan dengan teori dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum.
2. Pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja non finansial Untirta. Hal ini berarti penerapan PK-BLU dapat meningkatkan kinerja non finansial Untirta. Hal ini dikarenakan Pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU)

mempunyai tujuan agar pelayanan publik seharusnya mengalami peningkatan sehingga para stakeholder merasakan peningkatan pelayanan publik lebih memuaskan. Sehingga hasil penelitian sejalan dengan teori dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) memiliki pengaruh positif terhadap mutu layanan pendidikan Untirta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PK-BLU dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan Untirta. Sehingga hasil penelitian sejalan dengan teori dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Implikasi Manajerial

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) terhadap kinerja finansial dan kinerja non finansial dengan implikasi manajerial sebagai berikut:

1. Bagi Untirta

Hasil ini dapat dijadikan referensi dalam menentukan pengelolaan keuangan badan layanan umum dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja finansial dan kinerja non finansial yakni rasio keuangan, aspek kepatuhan dan standar pelayanan pemangku kepentingan dan standar pelayanan untuk perspektif proses pendidikan dan pengembangan (*teaching and learning process*)

2. Bagi Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) terhadap kinerja finansial, kinerja non finansial dan mutu layanan akademik Untirta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony dan Govindrajana. (2011). *Management Control System Edisi 11*. Jakarta : Salemba Empat Buku II.
- Anggit Maharani, M. A. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jupe UNS Vol 1 No. 3* , 1-10.
- Aritonang & Lerbin (2007). *Teori dan Praktek Riset Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta : BPFU Universitas Gajah Mada.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima)*. Semarang: Univeritas Diponegoro.
- Gujarati, D., & Zain, A. B. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika Terjemahan Mangunsong, RC* . Jakarta : Salemba Empat .
- IAI. (2011). *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta: Gramedia.

- Iswari, D. R. (2011). Penilaian Kinerja Aspek Finansial dan Non Finansial Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar . *Tesis Pascasarjana Universitas Udayana* .
- Jama'an. (2008, - -). <http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html>. Retrieved Oktober 14, 2014, from <http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html>: <http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html>
- Kotler, P. (2008). *Marketing Pemasaran diterjemahkan Benyamin Molan* .Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Lukman, M. (2013). *Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta : Andi .
- Meidiyawati. (2011). *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi* . Sumatera utara : Tesis Universitas Sumatera Utara .
- Muhtar, A. M. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jupe UNS Vol 1 No. 3* , 1-10.
- Oliver, R. (2008). A Conceptual Model of Service Quality and Service Satisfaction Compatible Goals Different concepts . *Journal of Customer Research Vol 2* , 68-85.
- Prihatsanti, U. (2010). Hubungan Kepuasan Kerja dan Need For Achievement dengan Kecenderungan Resistance To Change Pada Dosen UNDIP Semarang. *Jurnal Psikologi Undip Vol. 8 No. 2* .
- Rinala, Y. &. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik terhadap Kepuasan dan Loyalitas Mahasiswa pada Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali . *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha* , 1-12.0.
- Rosidi, F. P. (2013). Analisa Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD DAN Dampaknya Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* , -.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Bandung : Alfabeta .
- Suwardjono. (2008). *Teori Akuntansi: Perekayaan Pelaporan Keuangan (Edisi III)* . Yogyakarta : BPF E.
- Taman Abdullah, d. (2013). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta . *Jurnal Nominal/ Volumen II No I* , -.
- Untirta. (2012). *Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Waluyo, I. (2011). Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru dalam Pengelolaan Keuangan di Satker Pemerintah . *Jurnal Pendidikan Akuntansi* , 1-15.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
7. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2001 Tanggal 19 Maret 2001 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Perguruan Tinggi Negara
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/KMK.05/2012 tentang penetapan Untirta sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untirta
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
12. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 05/PMK05/2010 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum